



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya (www.idx.co.id). Sebelum terbentuknya PT. Bursa Efek Indonesia (PT.BEI) pada waktu itu terdapat dua PT Bursa Efek yaitu : PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tahun 2007, para pemegang saham kedua Bursa Efek telah menyetujui rancangan penggabungan Bursa Efek Surabaya ke dalam Bursa Efek Jakarta yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 secara resmi Bursa Efek Indonesia telah efektif (www.idx.com). Bursa Efek ini akan memfasilitasi perdagangan saham (ekuiti), surat hutang (*fixed income*), maupun perdagangan derivatif (*derivative instrument*). Saat ini Bursa Efek Indonesia menjadi sentral bagi penyebaran informasi bursa dan keterbukaan emiten kepada publik, sedangkan Bapepam-LK berfungsi sebagai pengawas dan pembuat peraturan. Badan Pengawas Pasar Modal (2003) menetapkan peraturan bahwa laporan keuangan berkala disertai dengan laporan akuntan

disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hasil audit atas perusahaan wajib diumumkan ke publik paling tidak melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, secara periodik dan tepat waktu.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut IAI (2012), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. IAI (2012) juga menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi dan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu IAI (2012) mengatur penyajian laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- 1) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;

Kieso (2013) mendefinisikan,

A statement of financial position (sometimes referred to as a balance sheet) reports the assets, liabilities, and equity of a company at specific date.

IAI (2012) menjelaskan bahwa neraca berisi aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi yang menggunakan metode ekuitas,

persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang dimiliki untuk dijual, utang dagang dan terutang lainnya, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang dimiliki untuk dijual, kepentingan non-pengendali, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2) Laporan laba rugi komprehensif selama periode;

Kieso (2013) menjelaskan bahwa,

An income statement presents the revenues and expenses and resulting net income or net loss of a company for a specific period of time

IAI (2012) lebih lanjut menjelaskan bahwa komponen laporan ini terdiri dari: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi, komponen dari pendapatan komprehensif lain, total laba rugi komprehensif.

3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a) total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;

c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:

(1) laba rugi;

(2) masing-masing pos penghasilan komprehensif lain; dan

(3) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4) Laporan arus kas selama periode;

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain;

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,

laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

- 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Dalam PSAK 1, IAI (2012) menjelaskan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

2.3 Auditing

Arens (2012) menjelaskan bahwa audit adalah:

The accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Arens (2012) juga menyatakan bahwa tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Seorang Akuntan Publik tidak hanya menyediakan jasa *auditing*. Akuntan Publik yang berpraktik di Kantor Akuntan Publik menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Jasa yang disediakan oleh Akuntan Publik dapat diklasifikasikan dalam bentuk *assurance service* dan *nonassurance service*. Arens (2012) menjelaskan bahwa,

assurance service is an independent professional service that improves the quality of information for decision makers.

Pembuat keputusan bisnis memerlukan jaminan kepastian atas informasi yang dibuat oleh suatu organisasi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan relevansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, profesional yang independen seperti *Certified Public Accountant* perlu menguji informasi tersebut. Salah satu *assurance service* yang dapat disediakan oleh Akuntan Publik adalah jasa atestasi. Arens (2012) mendefinisikan jasa atestasi sebagai,

A type of assurance service in which the CPA firm issues a report about the reliability of an assertion that is made by another party.

Menurut Arens (2012) jasa atestasi ini dibagi dalam lima klasifikasi, yaitu:

1) *Audit of Historical Financial Statements*

The auditor issues a written report expressing an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with the applicable accounting standards.

2) *Audit of Internal Control over Financial Reporting*

Management asserts that internal controls have been developed and implemented following well established criteria.

Dalam menyediakan jasa ini auditor menilai kontrol internal suatu perusahaan termasuk efektifitas kontrol internal dalam menyajikan laporan keuangan.

3) *Review of Historical Financial Statements*

Management asserts that the statements are fairly stated in accordance with accounting standards, the same as for audits.

Jasa ini hampir sama dengan jasa *auditing*, hanya saja tingkatnya lebih rendah, yaitu Akuntan Publik hanya melakukan *review* sehingga bukti yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan jasa *auditing*.

4) *Attestation Services on Information Technology*

Management makes various assertions about the reliability and security of electronic information.

Akuntan Publik menyediakan jasa attestasi atas teknologi informasi seperti *website*, *security*, dan integritas data suatu organisasi untuk memberikan kepastian kepada pengguna informasi bahwa informasi yang menggunakan teknologi tersebut sudah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku.

5) *Other Attestation Services*

Jasa attestasi lain yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik adalah *review and compilation services, review of interim financial information for publik companies, webtrust and systrust services, report on controls at service organizations, prospective financial statements, agreed-upon procedures engagements* (Arens, 2012).

Sedangkan *nonassurance service* adalah jasa yang disediakan oleh Akuntan Publik di luar bidang *assurance service*. *Nonassurance service* yang dapat disediakan oleh Akuntan Publik adalah *accounting and bookkeeping services*, *tax services*, *management consulting services* (Arens, 2012).

Assurance service berupa *auditing* merupakan jasa profesi Akuntan Publik yang paling dikenal dalam masyarakat. Dalam menyediakan jasa *auditing* kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang kompeten untuk pelaksanaan audit, yakni Akuntan Publik.

Selama melaksanakan audit atas suatu perusahaan, Akuntan Publik dihadapkan pada risiko audit. Dalam SA Seksi 312 (IAPI, 2011) dijelaskan bahwa risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. IAPI (2011) membagi risiko audit dalam tiga komponen, yaitu:

- 1) Risiko Bawaan

Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.

- 2) Risiko Pengendalian

Risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas.

3) Risiko Deteksi

Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

Sehubungan dengan risiko audit ini, Arens (2012) menjelaskan jika *inherent risk* (risiko bawaan) dalam suatu area audit semakin besar maka KAP perlu menugaskan staf yang lebih berpengalaman untuk melakukan pengujian audit yang lebih seksama. Sedangkan *control risk* (risiko pengendalian) ini menunjukkan efektifitas internal control dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Selain itu, mengenai risiko deteksi dijelaskan bahwa,

Planned detection risk determines the amount of substantive evidence that the auditor plans to accumulate, inversely with the size of planned detection risk.

Jadi, semakin kecil nilai *planned detection risk*, maka auditor perlu mengumpulkan bukti audit yang semakin banyak.

Arens (2012) menjelaskan bahwa,

The final stage in the auditing process is preparing the audit report, which communicates the auditor's findings to user.

Akuntan Publik yang bertugas sebagai auditor hanya bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan. Sedangkan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas (IAI, 2012). Untuk mengurangi risiko audit, auditor yang kompeten dan independen perlu menjalankan audit berdasarkan standar audit

yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam SA Seksi 150 IAPI (2011) menjelaskan standar audit sebagai berikut:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Perencanaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Auditor yang independen dan kompeten melakukan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memerlukan waktu untuk melakukan pemeriksaan hingga memperoleh keyakinan yang cukup dalam mengeluarkan opini audit. Keyakinan menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai. Tingkat kepastian yang dapat dicapai auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti yang kompeten dan cukup atas suatu area audit. Semakin banyak bukti yang digunakan dalam pengujian audit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit menjadi lebih lama.

Selain itu auditor juga perlu mempertimbangkan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan klien. Selama melaksanakan suatu

prosedur audit, auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu dan mempertimbangkannya secara keseluruhan hingga menunjukkan apakah terdapat suatu kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Kondisi atau peristiwa tersebut dijelaskan oleh IAPI (2011) sebagai berikut:

1. Trend negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, *ratio* keuangan penting yang jelek
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan memenuhi kewajiban utangnya dan perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan baru atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aset.
3. Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi.

Setelah auditor memperoleh keyakinan yang cukup berdasarkan bukti yang dikumpulkan, pengujian, dan informasi yang diperoleh mengenai kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor dapat mengeluarkan laporan auditor. laporan auditor ini dapat dialamatkan kepada direksi, komisaris, dan/atau para pemegang saham (IAPI, 2011).

2.4 Audit Delay

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan (Kartika, 2011). Segala peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan audit mempengaruhi lamanya *audit delay*. Jangka waktu *audit delay* ditunjukkan dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 *Audit Delay*



Setelah manajemen selesai menyusun dan menyajikan laporan keuangan, manajemen akan menggunakan jasa *auditing* dari Kantor Akuntan Publik. Proses audit ini nantinya akan menghasilkan laporan keuangan auditan, yaitu laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapatkan opini dari Akuntan Publik. Setelah Laporan Keuangan perusahaan selesai diaudit dan disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan

Auditan, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tersebut kepada Bapepam-LK. Bapepam-LK telah menetapkan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan ini. Dalam peraturan X.K.2 Bapepam (2003) menjelaskan bahwa perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu di antaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten dan Perusahaan Publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Namun, Bursa Efek Jakarta (2004) dalam peraturan I-H juga menjelaskan bahwa khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.
5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

Perusahaan yang tidak ingin dikenai sanksi perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

IAI (2012) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan menjadi sumber informasi bagi *stakeholders* saat ingin mengambil keputusan. Setiap keputusan tersebut perlu diambil tepat pada saat dibutuhkan berdasarkan informasi yang relevan dan memiliki keandalan. Dalam Karakteristik Kualitatif Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012) informasi memiliki kualitas yang relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Namun, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh penggunanya sebagai penyajian yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Keputusan yang diambil berdasar laporan keuangan dipengaruhi oleh ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tersebut. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012) mengungkapkan bahwa ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan menjadi kendala bagi informasi yang relevan dan handal. Padahal, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Jika tanggal penerbitan Laporan Keuangan kepada publik melampaui tiga bulan dari tanggal laporan keuangan tahunan maka *stakeholders* akan mengalami hambatan dalam menentukan *decision making*.

Jasa audit menjadi suatu *assurance service* bagi pengguna laporan keuangan tersebut terutama bagi *decision maker*. Melalui *assurance service* yang disediakan oleh Akuntan Publik, *decision maker* memperoleh kepastian bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, *audit delay* suatu perusahaan perlu diperhatikan supaya *decision makers* dapat membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan yang relevan dan andal.

Faktor yang menentukan jangka waktu *audit delay* ini adalah segala peristiwa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik hingga penerbitan opini oleh Akuntan Publik. Tujuan proses pelaksanaan audit ini adalah auditor memperoleh keyakinan yang cukup untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan dalam laporan audit. Opini yang dikeluarkan Akuntan Publik memiliki tanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu, Akuntan Publik menghadapi risiko dimana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalahsajikan secara material (Tuanakotta, 2013). Risiko ini dapat ditekan hingga tingkat rendah yang dapat diterima. Namun, dari semua risiko audit yang dihadapi oleh auditor, hanya risiko deteksi yang dapat diminimalisir. Untuk mengurangi risiko deteksi yang tinggi, auditor memerlukan jumlah sampel yang lebih banyak untuk diuji dalam proses audit. Oleh karena itu, proses audit yang dijalankan untuk menekan risiko ini mempengaruhi lama waktu pelaksanaan audit.

Auditor dapat menekan risiko deteksi menjadi risiko yang dapat diterima dengan cara mengikuti pola standar audit sebagai acuan bagi auditor saat melakukan audit. Dalam standar pekerjaan lapangan dijelaskan bahwa Akuntan Publik yang sedang melaksanakan *auditing* harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (IAPI, 2011). Pengumpulan bukti audit kompeten yang cukup ini merupakan penerapan konsep *reasonable assurance* (asuransi yang layak). Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa asuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (*sufficient appropriate audit evidence*) untuk menekan risiko audit.

Proses penekanan risiko ini dimulai dari penilaian risiko (*risk assessment*) untuk menentukan risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2013). Setelah itu, auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sebagai tanggapan terhadap risiko yang dinilai (Tuanakotta, 2013). Setelah itu Akuntan Publik perlu mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup. Dalam memperoleh bukti audit kompeten, Akuntan Publik memerlukan waktu yang cukup sesuai dengan lingkungan bisnis dan pengendalian intern perusahaan klien.

Waktu pengerjaan audit ini dipengaruhi oleh permintaan perusahaan klien yang menginginkan pekerjaan audit diselesaikan dengan

lengkap. Hal ini berarti Akuntan Publik perlu melaksanakan *audit program* sesuai dengan standar yang berlaku.

Timing is also influenced by when the auditor believes that audit evidence will be most effective and when the audit staff is available. (Arens, 2012)

Saat Akuntan Publik yakin bahwa dibutuhkan lebih banyak bukti audit maka waktu audit juga semakin lama karena terdapat lebih banyak bukti audit yang harus diuji. Demikian juga dengan jumlah staf audit, jika staf audit semakin banyak berarti pekerjaan audit dapat diselesaikan lebih cepat karena terdapat pembagian tugas dan meringankan pekerjaan tim audit.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total *asset* atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Febrianty, 2011). Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki berarti auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan atas aset perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpengaruh pada waktu pengerjaan audit (Arens, 2012).

Perusahaan yang berukuran besar juga memiliki transaksi yang lebih kompleks karena transaksi dapat terjadi dengan pihak eksternal maupun internal yang juga memiliki hubungan istimewa. Sebagai contoh Jeter (2011) menjelaskan bahwa,

An affiliate company may purchase bonds issued by another affiliate directly from the issuing company or from outsiders after the original purchase. In either case, because the bonds are held within the affiliated group, the intercompany bond investment (a receivable) and the bonds payable (a liability), along with any related intercompany interest expense and interest revenue, must be eliminated.

Sehubungan dengan hal ini IAPI (2011) menjelaskan bahwa auditor harus memandang transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dalam rerangka pernyataan prinsip akuntansi, dengan penekanan pada cukup atau tidaknya pengungkapannya. Di samping itu, auditor harus menyadari bahwa substansi suatu transaksi dapat secara signifikan menjadi berbeda dari bentuknya dan bahwa laporan keuangan harus mengidentifikasi substansi transaksi tersebut dan bukan hanya bentuk hukumnya semata.

Oleh karena itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin banyak bukti yang perlu dikumpulkan oleh Akuntan Publik, sehingga waktu pelaksanaan audit menjadi lebih lama. Selain itu, sistem perusahaan yang kompleks membuat auditor harus mempertimbangkan bagaimana lingkungan Sistem Informasi Komputer (SIK) berdampak terhadap audit (IAPI, 2011). Hal ini menyebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemeriksaan.

Perusahaan besar juga cenderung melakukan kombinasi bisnis berupa konsolidasi dan memiliki cabang yang tersebar di berbagai daerah dengan skala lokal, nasional, maupun internasional. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IAPI (2011) dalam standar pekerjaan lapangan yang mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup menyebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan karena auditor perlu melihat bukti fisik dan ditugaskan ke kantor cabang hingga memperoleh keyakinan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Saat *audit delay* membutuhkan waktu yang lebih lama, maka terdapat kemungkinan bahwa laporan keuangan disampaikan tidak tepat waktu. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diprosikan dengan perhitungan logaritma total aset.

Kartika (2011) menyatakan bahwa hipotesis mendukung hubungan negatif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay*. Menurut Dyer dan Mc Hugh, 1975 dalam Kartika (2011) perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Shulthoni (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sistem kontrol internal yang lebih solid yang dapat mengurangi kecenderungan terjadinya *error* dalam laporan keuangan sehingga memungkinkan auditor untuk mengandalkan sistem kontrol internal perusahaan lebih ekstensif. Rachmawati (2008), Febrianty (2011), Yaputro (2012), dan Che-Ahmad (2008) juga menyatakan bahwa *size* perusahaan mempengaruhi *audit delay* secara

signifikan. Sedangkan Shulthoni (2012), Iskandar dan Trisnawati (2010), dan Venny (2008) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuatlah hipotesis pertama atas penelitian ini, yaitu:

Ha₁ : Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan logaritma total aset berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.6 Kompleksitas Operasi Perusahaan

Kompleksitas operasi perusahaan bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya (Widosari dan Rahardja, 2012). Sehubungan dengan ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan yang melakukan diversifikasi dapat terjadi dalam bentuk pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan dapat berupa *external expansion* (Jeter dan Chaney, 2011), yaitu

External expansion that is they try to expand by acquiring one or more other firms.

Jeter dan Chaney (2011) menjelaskan bahwa *external expansion* atau kombinasi bisnis ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan *internal expansion*, yaitu:

1. *Operating synergies*

Kombinasi bisnis dapat berupa *vertical merger* (merger antara *supplier* dan *consumers*) dan *horizontal merger* (merger antar *competitor*). Hal ini mengakibatkan adanya pemangkasan biaya operasi perusahaan.

2. *International marketplace*

Kombinasi bisnis dapat meningkatkan kemampuan kompetisi internasional perusahaan.

3. *Financial synergy*

Perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis dapat mengambil manfaat dari peraturan pajak pendapatan karena terjadi kompensasi kerugian akibat penggabungan usaha.

4. *Diversification*

Perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif.

Jeter dan Chaney (2011) menjelaskan bahwa bisnis kombinasi dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Statutory Merger*

Kombinasi bisnis ini terjadi saat,

One company acquires all the net assets of one or more other companies through an exchange of stock, payment of cash or other property, or issue of debt instruments (or a combination of these methods).

Perusahaan yang menjadi *acquiring company* tetap berdiri dan *acquired company* berhenti beroperasi. Gambar 2.2 menjelaskan kombinasi bisnis ini.

Gambar 2.2 *Statutory Merger*



2. *Statutory Consolidation*

Kombinasi bisnis ini terjadi saat,

A new corporation is formed to acquired two or more other corporations through an exchange of voting stock; the acquired corporations then cease to exist as separate legal entities.

Gambar 2.3 menunjukkan hubungan kombinasi bisnis ini.

Gambar 2.3 *Statutory Consolidation*



3. *Stock Acquisition*

Kombinasi bisnis ini terjadi saat,

One corporation pays cash or issues stock or debt for all or part of the voting stock of another company, and the acquired company remains intact as a separate legal entity.

Saat *acquiring company* memperoleh *controlling interest* dari *voting stock* milik *acquired company*, maka akan terbentuk hubungan perusahaan induk (*parent company*) dan anak perusahaan (*subsidiaries company*).

Gambar 2.4 menunjukkan hubungan kombinasi ini.

Gambar 2.4 *Stock Acquisition*



PSAK No.4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi menjelaskan bahwa anak perusahaan (*subsidiary*) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). Sedangkan, induk perusahaan (*parent company*) adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan (IAI, 2012). Kelompok perusahaan yang melakukan *stock acquisition* menyajikan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan dari suatu grup perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.

IAI (2011) dalam PSAK No.4 juga dijelaskan kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan *controlling interest* atas suatu anak perusahaan, yaitu:

1. Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain, atau
2. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, atau
3. Mampu menunjuk atau meberhentikan mayoritas pengurus perusahaan, atau
4. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan, dan beban (IAI, 2012). Laporan keuangan konsolidasi disajikan sebagai informasi atas suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan konsolidasi perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh IAI (2012) dalam PSAK No. 4, yaitu:

1. Saldo nilai tercatat (*carrying amount*) penyertaan induk perusahaan pada masing-masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi bagian induk perusahaan.
2. Saldo antar perusahaan dan transaksi antarperusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban, dan dividen harus dieliminasi seluruhnya.
3. Kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi (*unrealized profits*) yang berasal dari transaksi antarperusahaan harus dieliminasi.
4. Hak minoritas dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasi untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk perusahaan.
5. Hak minoritas dalam aset bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di antara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aset bersih terdiri atas:
 - a. Suatu jumlah saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan cara yang ditentukan dalam PSAK No.22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; dan

- b. Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah tanggal penggabungan usaha.

Pada akhir tahun buku perusahaan yang melakukan konsolidasi perlu segera menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Setelah itu perusahaan induk dan anak perusahaan diaudit oleh auditor eksternal. Meskipun laporan keuangan kelompok perusahaan disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi, tetapi masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain (IAI, 2012). Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor independen yang digunakan oleh masing-masing entitas berasal dari KAP dan auditor eksternal yang berbeda.

Auditor eksternal melakukan audit dengan mengumpulkan sampel dan melakukan pengujian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAPI. Namun, karena laporan keuangan disajikan dalam bentuk konsolidasi maka auditor eksternal perlu melakukan pengujian dengan ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko audit dan untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan keuangan konsolidasi disajikan secara wajar. Oleh karena itu, *audit delay* menjadi semakin lama. Dalam penelitian ini kompleksitas operasi perusahaan diprosikan dengan logaritma jumlah *subsidiaries* + 1. Angka satu yang ditambahkan dalam perhitungan logaritma ini adalah perusahaan itu sendiri selaku induk perusahaan.

Che-Ahmad dan Abidin (2008) memperoleh hasil bahwa kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu determinan utama terjadinya *audit delay*. Namun, Modugu, dkk (2012) memperoleh hasil bahwa anak perusahaan multinasional menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan anak perusahaan lokal. Sedangkan hasil yang diperoleh Widosari dan Rahardja (2012) dan Angruningrum dan Wirakusuma (2013) memperoleh hasil bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuatlah hipotesis kedua sebagai berikut:

Ha₂: Kompleksitas operasi perusahaan yang diproksikan dengan logaritma jumlah *subsidiaries* + 1 berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.7 Solvabilitas

Kartikahadi (2012) menjelaskan bahwa solvabilitas (*solvency*) adalah kemampuan entitas untuk melunasi liabilitasnya. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012) dijelaskan bahwa karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya

yang memiliki masa manfaat masa depan demi memenuhi tuntutan pihak lain. Lebih lanjut IAI(2012) menjelaskan bahwa penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:

1. pembayaran kas;
2. penyerahan aset;
3. pemberian jasa;
4. penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
5. konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

Prihadi (2008) mengatakan bahwa ada beberapa istilah lain yang sepadan dengan *solvency* yaitu *gearing* dan *leverage*. Rasio solvabilitas digunakan untuk menganalisis solvabilitas suatu perusahaan. Kartikahadi (2012) menjelaskan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur jumlah relatif liabilitas yang digunakan suatu entitas untuk membiayai kegiatan usahanya, terutama untuk mengukur kemampuan liabilitasnya. Sehingga semakin besar rasio solvabilitas yang dimiliki suatu perusahaan mengindikasikan semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek.

Kartika (2011) mengatakan suatu perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan tersebut mempunyai aset atau kekayaan yang cukup

untuk membayar semua hutangnya. Namun begitu pula sebaliknya apabila proporsi hutang lebih besar dari jumlah aset berarti akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit (Kartika, 2011). Sesuai dengan ketentuan IAPI (2011) yang menyatakan bahwa auditor perlu mengumpulkan informasi yang dipertimbangkan secara keseluruhan untuk memperoleh keyakinan apakah terdapat kesangsian yang besar atas kelangsungan hidup perusahaan yang diaudit. Salah satu peristiwa yang dipertimbangkan adalah trend negatif sebagai contoh mempertimbangkan *ratio* keuangan penting yang jelek (IAPI, 2011). Salah satu *ratio* yang dipertimbangkan pengguna laporan keuangan adalah *solvency ratio*, terutama oleh kreditor (Prihadi, 2008). IAPI (2011) menjelaskan setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu panjang, maka auditor harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak dari kondisi atau peristiwa tersebut. Auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut, dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan bila rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan, mampu mengurangi dampak negatif atas kondisi atau peristiwa tersebut dalam jangka waktu yang pantas. Oleh karena itu, waktu pengerjaan audit menjadi semakin lama dan dapat menyebabkan *audit delay* yang melampaui batas. Dalam penelitian

ini solvabilitas diproksikan menggunakan rasio *total debt to equity* (Prihadi, 2008) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Total Debt to Equity} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Kartika (2011), Febrianty (2011), dan Venny (2008) memperoleh hasil dari penelitiannya bahwa hipotesis mendukung hubungan positif dan signifikan antara solvabilitas dengan *audit delay*. Terdapat perbedaan dalam Febrianty (2011) karena menggunakan variabel tingkat *leverage* dalam bentuk *debt to total asset ratio*. Sedangkan Iskandar (2010), Shulthoni (2012), dan Rachmawati (2008) menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara solvabilitas dengan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuatlah hipotesis ketiga sebagai berikut

Ha₃: Solvabilitas yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.8 Laba Rugi Operasi

IAI (2012) menjelaskan bahwa laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Selain itu, laba rugi operasi perusahaan juga dapat menunjukkan analisis laporan keuangan dalam bentuk *profit margin*.

Profit margin is a measure of the percentage of each currency unit of sales that results in net income. (Kieso, 2013)

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2012) menjelaskan bahwa penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. IAI (2012) juga menjelaskan bahwa unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- (b) Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban dan mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Jika penghasilan lebih besar dari beban maka perusahaan memperoleh laba dan jika beban lebih besar dari pada penghasilan maka perusahaan menderita kerugian.

Ketika kerugian terjadi perusahaan ingin menunda *bad news* sehingga perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwalkan ulang penugasan audit (Kartika, 2011). Selain itu, auditor akan lebih berhati-hati

selama proses audit karena mungkin kerugian ini disebabkan oleh kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen informasi tentang laba perusahaan. Padahal, Kieso (2013) menjelaskan bahwa kegunaan laporan laba rugi operasi perusahaan adalah untuk *evaluate the past performance, provide a basis for predicting future performance, help assess the risk or uncertainty of achieving future cash flows*. Penambahan waktu karena Akuntan Publik ingin menambah bukti audit atas pengujian laporan laba rugi berakibat bertambahnya waktu pelaksanaan audit oleh auditor dan dapat menyebabkan *audit delay* yang melampaui batas. Dalam penelitian ini laba rugi operasi diproksikan dengan *profit margin* (Kieso, 2013) sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Net Income}}{\textit{Sales}}$$

Kartika (2011) dan Iskandar (2010) mengatakan bahwa hasil penelitian mereka membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara laba rugi operasi dengan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat hipotesis keempat sebagai berikut:

Ha₄: Laba rugi operasi yang diproksikan dengan *profit margin* berpengaruh terhadap *audit delay*

2.9 Reputasi KAP

Kartika (2011) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. Arens (2008) mengategorikan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi empat kategori:

1. Kantor Internasional Empat Besar

Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Kantor Empat Besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga.

2. Kantor Nasional

Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor ini besar tetapi jauh lebih kecil dibanding dengan Kantor Empat Besar. Kantor Nasional memberikan jasa yang sama dengan Kantor Empat besar dan bersaing secara langsung dengan kantor Empat Besar untuk mendapatkan klien. Setiap Kantor Nasional berafiliasi dengan kantor di negara lain dan mempunyai kemampuan bertaraf internasional.

3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar

Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien dalam jarak yang tidak terlalu jauh.

4. Kantor Lokal Kecil

Lebih dari 95% dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa lainnya terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba.

KAP yang berukuran besar (KAP *Big Four*) memiliki standar profesional penyelesaian audit yang lebih tinggi dan didukung oleh tim audit yang lebih berpengalaman di bidangnya, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four* cenderung menerbitkan laporan keuangan tepat waktu. Hossain dan Taylor (1998) dalam Shultoni (2012) juga menyatakan bahwa KAP yang besar (berafiliasi dengan KAP Internasional) memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan kerja audit lebih cepat untuk mempertahankan reputasi mereka. Dalam penelitian ini reputasi KAP diproksikan menggunakan data *dummy*. Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four* diberi kode 1, perusahaan yang menggunakan jasa audit di luar KAP *Big Four* diberi kode 0. Shultoni (2012), Iskandar (2012), Lee & Jahng (2008), dan Shukeri (2012) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*. Namun terdapat perbedaan dalam Lee & Jahng (2008) karena mereka menggunakan *audit report lag* sebagai variabel

dependennya. Sedangkan Kartika (2011) dan Febrianty (2011) memperoleh hasil bahwa reputasi KAP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat hipotesis kelima sebagai berikut:

Ha₅: Reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.10 Opini Auditor

Arens (2012) menjelaskan bahwa,

The final stage in the auditing process is preparing the audit report, which communicates the auditor's finding to users.

Hal ini juga diatur dalam Standar Pelaporan (IAPI, 2011) yang menyatakan bahwa laporan auditor menyatakan:

1. Kepatuhan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;
2. Jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai;
4. Memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Ada lima kemungkinan pernyataan pendapat yang dinyatakan auditor dalam setiap keadaan yang dijelaskan sebagai berikut (IAPI, 2011):

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang terkait posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor

Hal ini mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam segala yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Perusahaan klien yang memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian akan berusaha menunda penerbitan laporan keuangan auditan karena opini tersebut menurunkan nilai dan reputasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan *audit delay* yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini opini audit menggunakan data *dummy*. Perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian diberi kode 1, perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian diberi kode 0.

Che-Ahmad (2008), Lee & Jahng (2008), Rachmawati (2008), Venny (2008), Shukeri (2012) menunjukkan hasil bahwa opini auditor memiliki hubungan yang signifikan terhadap *audit delay*. Hanya saja dalam Lee & Jahng (2008) menggunakan variabel *audit report lag*. Kartika (2011), Iskandar (2010), dan Shulthoni (2012) menjelaskan bahwa hipotesis tidak dapat membuktikan adanya hubungan signifikan antara opini audit dengan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat hipotesis keenam sebagai berikut:

Ha₆: Opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

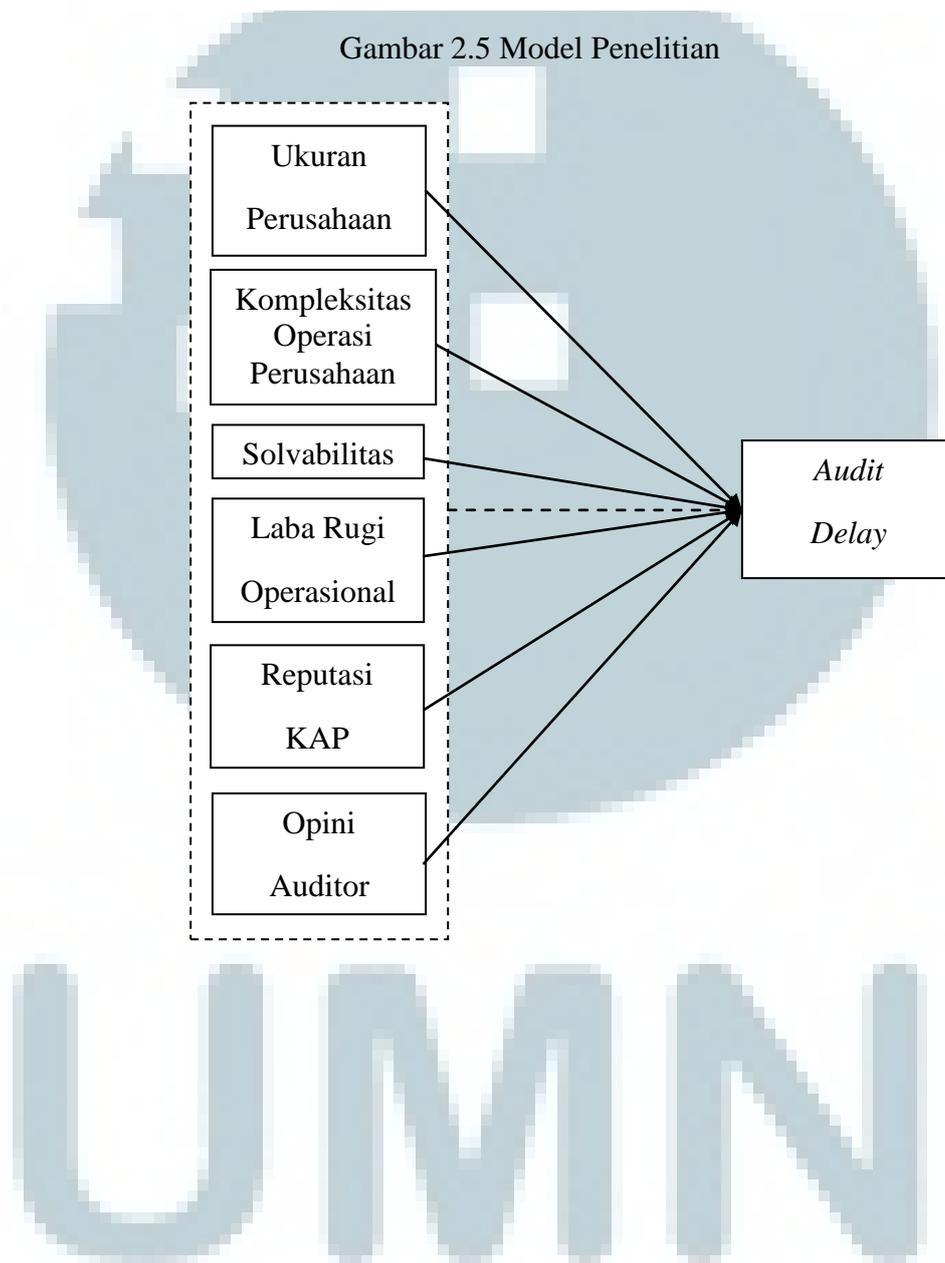
2.11 Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Solvabilitas, Laba Rugi Operasi, Reputasi KAP, dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay*

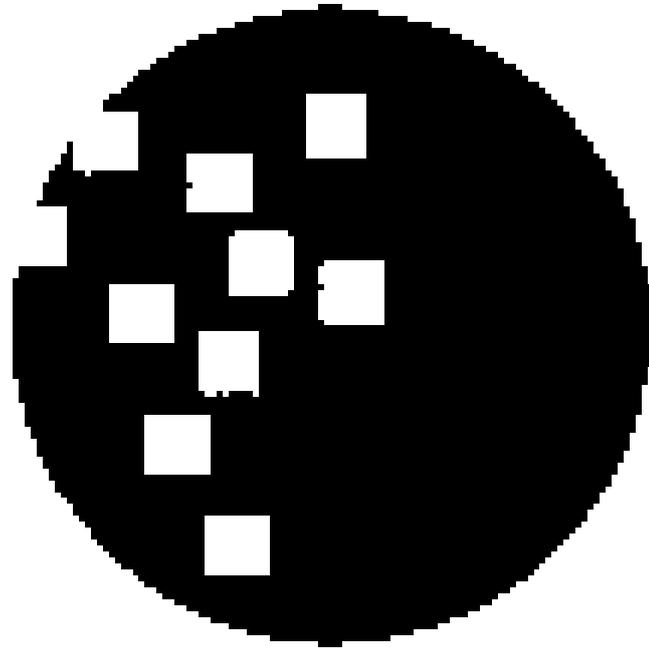
Venny (2008) mendapat hasil penelitian yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP, solvabilitas, laba rugi operasi, dan opini auditor secara bersama-sama mempengaruhi lamanya *audit delay*. Kartika (2011) juga menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan reputasi auditor terhadap *audit delay*. Selain itu, Febrianty (2011) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, kualitas KAP mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap *audit delay* pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Rachmawati (2008) membuktikan bahwa profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, *size* perusahaan, KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan, Angruningrum dan Wirakusuma (2013) memperoleh hasil bahwa variabel independen (profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan komite audit) dan variabel kontrol (ukuran perusahaan) berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dibuatlah hipotesis ketujuh sebagai berikut:

Ha₇: Ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, solvabilitas, laba rugi operasi, reputasi KAP, dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.12 Model Penelitian

Model penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 2.5 sebagai berikut:





UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA